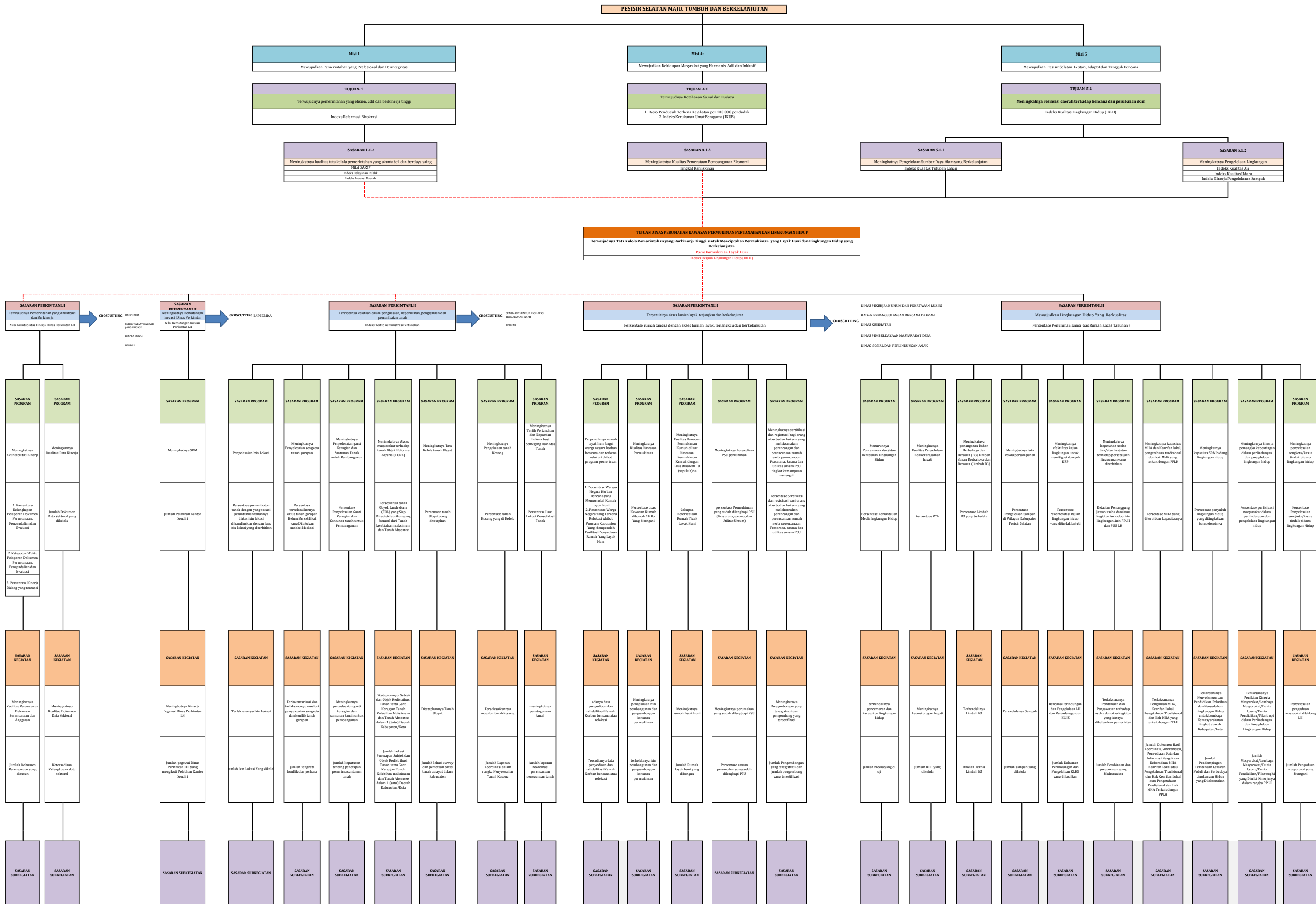
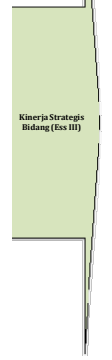
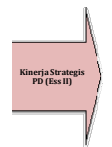


The diagram consists of three large, right-pointing arrows arranged horizontally. The first arrow is orange and contains the text "VISI RPJMD 2025-2029". The second arrow is light blue and contains the text "MISI RPJMD 2025-2029". The third arrow is light purple and contains the text "Kinerja Strategis Daerah/IKU Daerah".



Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perleengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bina Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyelenggaraan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum
Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan lahan tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Facilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan lahan tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota
Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/layak di di Kabupaten/Kota
Pemetaan dan Registrasi/pendaftaran tanah adat/layak di Kabupaten/Kota
Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
Inventarisasi segheta tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Facilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak
Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diberikan Hak Milik
Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat
Koordinasi penyajian usulan sertifikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah Yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyelenggaraan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum
Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan lahan tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Facilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan lahan tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota
Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/layak di di Kabupaten/Kota

Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Relokasi Program Kabupaten/Kota
Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSI bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSI bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Facilitasi Pengelolaan Kelengkapan dan Pemeliharaan Rumah Suku
Penatausahaan Pemertan Rumah Suku Umum dan/atau Rumah Khusus
Pembangunan Rumah Khusus
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan Rumah
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Suku yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota
Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemerintah lain Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
Pengutan dan Pembinaan kepada B/L/BBMD untuk Penyelenggaraan Rumah sederhana
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPOBU) Perumahan Umum/Rumah Suku Umum

Pelaksanaan Pemertan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Pemertan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Facilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Pemertan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Pelaksanaan Pemertan Kembali Kawasan Perumahan Kumuh
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Perumahan Kumuh
Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Perumahan Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali

Penyusunan dan Pelaksanaan Kompetensi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya
Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
Pemberian Informasi Peringatan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
Pelaksanaan remediasi
Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
Pelaksanaan rehabilitasi
Pelaksanaan Restorasi
Pelaksanaan Pemberian Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang memiliki kewenangan kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya

Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Perumahan
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
Pelayanan Peritinan Bersaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pelayanan Peritinan Bersaha Terintegrasi Secara Elektronik
Facilitasi Pemenuhan Ketertarikan Terkait Isi Usaha dan Standar Teknik Pengelolaan Sampah
Penyusunan dan Pelaksanaan Pendataan Kinerja Pengelolaan Sampah
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Pembiinan dan pengawasan pelaksanaan peritinan pengelolaan sampah



Peraturan dan
Registrasi/
pendaftaran tanah
sistem/daftar di
Kabupaten/Kota

Pembangunan/Pege mbangunan/Pembahasa an Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan Rencana Tapak dan Lantai Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Persebaran Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Painan, 18 Juni 2026
Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup



HOLI BUCHARI, ST, MT
NIP. 19750417 200501 1 013